



DPRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

KOLABORASIKAN AKTIVITAS SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA

Kelola Malioboro Tak Bisa Lepas Koordinasi

YOGYA (KR) - Sebagai wajah Kota Yogya maupun DIY, Malioboro selalu menjadi perhatian publik. Lokasinya yang berada di garis sumbu filosofis menjadikan pengelolaannya tidak bisa lepas dari koordinasi. Baik antara Pemda DIY dan Pemkot Yogya selaku regulator, maupun para pelaku dan komunitas di kawasan tersebut.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya yang juga Ketua Komisi D Suryani SE MSI, mengungkapkan Pemda DIY memegang peranan paling dominan terhadap penataan sumbu filosofis. Apalagi saat ini tengah masuk fase penilaian oleh UNESCO atas usulan dijadikan warisan budaya dunia. Karena di dalamnya terdapat Malioboro yang selama ini dikelola Kota Yogya, maka koordinasi harus diperkuat. "Selalu harus ada koordinasi untuk Malioboro ini. Kan di sana tidak hanya aktivitas budaya saja tetapi juga sosial dan ekonomi. Aspek tersebut dikolaborasikan dan menjadi kekuatan di Malioboro," tandasnya.

Oleh karena itu banyak pihak yang memiliki kepentingan terhadap Malioboro. Hal itu menjadikan Malioboro sebagai kawasan dengan daya saing tinggi. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di Malioboro, akan langsung menjadi perhatian publik. Jika hal itu tidak terkelola dengan baik, maka Kota Yogya secara keseluruhan akan terdampak. Dicontohkannya beberapa

SURYANI SE MSI
Fraksi PDI Perjuangan

KR-istimewa

waktu lalu terdapat pemberitaan kurang tepat terkait komunitas angklung yang tidak diperbolehkan beraktivitas di pedestrian Malioboro. Publik bahkan sempat dibenturkan oleh narasi jika Yogya melarang angklung. Padahal larangan tersebut karena memanfaatkan jalur pedestrian yang seoyangnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Tidak hanya angklung, hal itu juga berlaku bagi PKL, pengasong, otoped atau skuter listrik dan aktivitas lain. "Angklung atau kesenian lain yang digelar di persil tetap boleh. Tetapi yang di pedestrian ini memang perlu diten-

kan. Makanya kalau terus dibenturkan bisa menjadi kontroversi, padahal faktanya tidak demikian," tandas Suryani.

Di samping itu, imbuhan Suryani, komunitas angklung yang dulu beraktivitas di Malioboro juga sedang menjalani kurasi. Harapannya ada beberapa sentuhan yang memunculkan ciri khas Yogya. Agar selanjutnya kelompok tersebut difasilitasi tampil di kawasan Malioboro tanpa mengganggu jalur pedestrian. Seperti di Teras Malioboro 1, Teras Malioboro 2 maupun Slasar Malioboro yang dikelola oleh PT KAI Daop 6 Yogya.

Dirinya mendorong, selain koordinasi yang terus dibangun secara intensif, pendekatan humanis juga menjadi unsur mutlak. Terutama ketika berhadapan dengan masyarakat atau kelompok yang diketahui tidak sesuai aturan di Malioboro. Koordinasi yang intensif akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman atas sesuatu yang sedang atau akan ditertibkan. Sedangkan pendekatan humanis akan lebih memudahkan masyarakat dalam memahami aturan yang diberlakukan. "Malioboro ini tidak hanya bisa dilihat dari aspek ekonomi semata, tetapi juga sosial dan budayanya. Itu semua harus bisa dikolaborasikan. Sehingga koordinasi antar pemangku tidak boleh berhenti dan menegakkan aturan juga harus humanis atau persuasif," tandasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005